

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

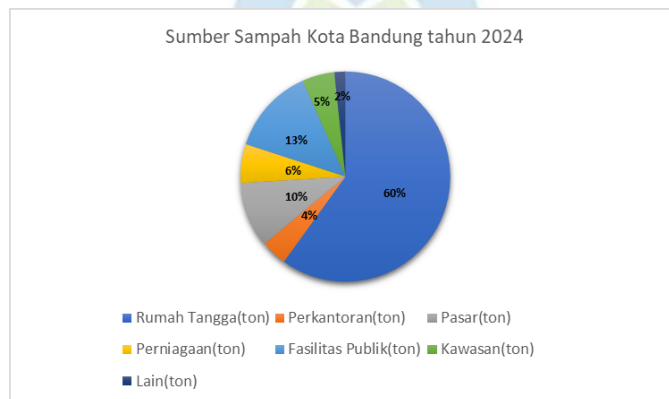
Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, karena lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai ruang berlangsungnya kehidupan manusia, tetapi juga menjadi penopang aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang meliputi benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang saling memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dari berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi saat ini, permasalahan sampah menempati posisi yang paling mendesak untuk ditangani, mengingat volume timbunan sampah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia (Zuraidah et al., 2022).

Persoalan sampah tersebut bukan sekadar fenomena lokal, melainkan telah berkembang menjadi isu global yang mendesak untuk diatasi. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan sampah sebagai material atau benda sisa aktivitas manusia yang sudah tidak memiliki nilai guna, tidak diinginkan, atau sengaja dibuang, dan bukan berasal dari proses alamiah (Yuwana & Adlan, 2021). Definisi tersebut menegaskan bahwa keberadaan sampah pada dasarnya merupakan konsekuensi langsung dari pola hidup dan konsumsi manusia, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian ekosistem, maupun percepatan perubahan iklim. Kondisi ini semakin diperparah oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat, sehingga menuntut hadirnya kebijakan publik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Kondisi tersebut juga dihadapi oleh Kota Bandung. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, Kota Bandung menghasilkan timbulan sampah sebesar 546.151,49 ton per tahun atau sekitar 1.496,31 ton per hari. Tingginya timbulan sampah tersebut sejalan dengan jumlah penduduk Kota Bandung yang mencapai 2.591.763 jiwa pada tahun 2024, meningkat dari 2.569.107 jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat turut mendorong peningkatan timbulan sampah rumah tangga, yang menjadi sumber utama sampah di Kota Bandung.

Gambar 1.1

Total Sumber Sampah Kota Bandung tahun 2024



Sumber : Situs SIPSN (Data diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.1, sumber timbulan sampah di Kota Bandung didominasi oleh sektor rumah tangga yang menyumbang sekitar 60% dari total sampah, diikuti oleh fasilitas publik sebesar 13% dan pasar sebesar 10%. Besarnya kontribusi sektor rumah tangga menunjukkan bahwa aktivitas domestik merupakan penyumbang utama timbulan sampah di Kota Bandung. Sebagian besar sampah rumah tangga tersebut berupa sampah organik, terutama sisa makanan, yang dihasilkan secara terus-menerus dari aktivitas rumah tangga dan kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat (Chaerul & Zatadini, 2020). Dominasi sampah organik ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat kota sangat ditentukan oleh efektivitas pengelolaan sampah organik sejak dari sumbernya.

Pengelolaan sampah organik menjadi aspek yang penting karena jenis sampah ini masih sering belum tertangani secara optimal (Adriani et al., 2023). Apabila tidak dikelola dengan baik, penumpukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air serta meningkatkan emisi gas rumah kaca akibat proses dekomposisi (Rafel et al., 2024). Oleh sebab itu, upaya pengelolaan sampah organik tidak cukup hanya didukung oleh kebijakan yang memadai, tetapi juga memerlukan implementasi yang efektif pada tingkat pelaksana agar pengurangan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan berbagai regulasi, antara lain menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Wali Kota Bandung, 2018a) serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai pedoman teknis pelaksanaannya (Wali Kota Bandung, 2018b). Namun demikian, ketersediaan regulasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian di lapangan. Hingga tahun 2024, data SIPSN menunjukkan bahwa tingkat pengurangan sampah di Kota Bandung baru mencapai 18%, sementara tingkat penanganan sampah berada di angka 67,59%. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Kota Bandung tidak semata-mata terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dijalankan oleh aktor pelaksana di lapangan.

Kesenjangan tersebut semakin nyata ketika dihadapkan pada persoalan daya tampung TPA Sarimukti yang mengalami kelebihan kapasitas. Sebagai respons atas kondisi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Instruksi Gubernur Nomor 02/PBLS.04/DLH melarang pembuangan sampah organik ke TPA Sarimukti mulai 1 Januari 2024. Kebijakan tersebut mendorong pengelolaan sampah organik dilakukan sejak dari sumbernya dan menjadi salah satu dasar penguatan pengelolaan sampah organik di tingkat kewilayahan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Bandung mengembangkan Program Rumah Maggot sebagai bagian dari gerakan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan). Program ini dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai salah satu strategi pengurangan sampah organik di tingkat wilayah dan ditargetkan diterapkan di 151 kelurahan se-Kota Bandung dengan kapasitas pengolahan sampah organik mencapai 1 ton per hari pada setiap kelurahan (Humas Kota Bandung, 2025).

Program ini memanfaatkan teknologi berbasis budidaya larva *Black Soldier Fly* (BSF), yang telah terbukti menjadi solusi efektif dalam mengolah sampah organik karena prosesnya relatif cepat hanya membutuhkan waktu sekitar 15 hari dari penanaman hingga panen (Dwi Mifta'ul Tesya, 2024). Selain mengurangi volume sampah, budidaya larva BSF juga memiliki potensi besar dalam mengolah limbah organik, baik yang berasal dari sisa hewan maupun tumbuhan, sekaligus menghasilkan produk sampingan berupa pupuk kompos yang bernilai ekonomis (Widyastuti, 2023).

Meskipun secara teknologi program ini terbilang sederhana dan telah terbukti efektif, keberhasilan implementasinya di lapangan sangat bergantung pada tata kelola di tingkat kelurahan. Kewenangan operasional Rumah Maggot berada sepenuhnya di tangan masing-masing kelurahan, yang bertanggung jawab mengelola dan menjalankan aktivitas maggotisasi sehari-hari. Sementara itu, peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung lebih bersifat sebagai fasilitator, yaitu membangun infrastruktur rumah maggot dan memberikan pelatihan, tanpa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional di tingkat kelurahan. Struktur relasi semacam ini menempatkan kelurahan sebagai aktor pelaksana yang memiliki ruang diskresi cukup besar dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik nyata di lapangan.

Untuk melihat sejauh mana ruang diskresi tersebut berdampak pada capaian program, keberhasilan pelaksanaan Rumah Maggot dapat ditelusuri melalui data pengolahan sampah organik yang dihasilkan oleh masing-masing kelurahan. Peneliti menggunakan data hasil monitoring dan evaluasi Rumah Maggot Tahun

2025 yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, yang kemudian diolah menjadi rata-rata jumlah sampah organik yang diproses melalui Rumah Maggot pada setiap kelurahan selama Tahun 2025. Hasil pengolahan data tersebut disajikan pada Tabel 1.1 untuk mempermudah perbandingan capaian antarkelurahan.

Tabel 1.1
Perbandingan Rata-rata Jumlah Sampah Organik yang Diolah melalui Rumah Maggot pada Setiap Kelurahan di Kota Bandung Tahun 2024 - 2025

NO	KELURAHAN	RATA-RATA (kg/bln)		NO	KELURAHAN	RATA-RATA (kg/bln)	
		2024	2025			2024	2025
1	Sarijadi	1602	7854	77	Warung Muncang	2562	2053
2	Sukarasa	1511	3378	78	Caringin	3108	6028
3	Gegerkalong	3214	6415	79	Cibuntu	8472	1150
4	Isola	2965	4052	80	Cijerah	1648	5641
5	Pasteur	1309	2148	81	Cigondewah Kaler	1522	1917
6	cipedes	2500	1824	82	Cigondewah Kidul	1556	6742
7	Sukawarna	2849	2386	83	Cigondewah Rahayu	757	1716
8	Sukabungah	3181	991	84	Gempolsari	3236	2224
9	Sukagalih	5242	2597	85	Sukahaji	542	329
10	Arjuna	4765	2747	86	Babakan	1158	1583
11	Husen Sastranegara	6553	4566	87	Babakan ciparay	554	1677
12	Pajajaran	3792	4826	88	Margahayu Utara	838	5402
13	Pamoyanan	1652	2245	89	Margasuka	6948	8693
14	Pasir Kaliki	505	933	90	Cirangrang	3014	3010
15	Sukaraja	1827	5075	91	Jamika	8336	2519
16	Campaka	2264	3593	92	Suka Asih	2295	4667
17	Maleber	524	2662	93	Babakan Asih	407	999
18	Garuda	760	850	94	Babakan Tarogong	2437	3384
19	Dunguscariang	2071	1389	95	Kopo	484	2215
20	Ciroyom	2220	8058	96	Cibaduyut	2571	2149
21	Kebon Jeruk	1958	5397	97	Cibaduyut Kidul	1802	4264

NO	KELURAHAN	RATA-RATA (kg/bln)		NO	KELURAHAN	RATA-RATA (kg/bln)	
		2024	2025			2024	2025
22	Cigending	1859	1812	98	Cibaduyut Wetan	1250	6440
23	Pasirjati	2661	3452	99	Kebon Lega	837	1606
24	Pasanggrahan	1942	2372	100	Mekarwangi	2221	3110
25	Pasirwangi	4059	1024	101	Situsaeur	1251	2606
26	Pasir Endah	3233	1229	102	Cibadak	2619	1918
27	Cipadung	4584	6913	103	Karanganyar	1160	1117
28	Cisurupan	4228	9715	104	Nyengseret	3481	4264
29	Palasari	703	4869	105	Panjunan	910	1430
30	Pasir Biru	2403	7445	106	Karasak	962	3201
31	Babakan Penghulu	2282	5418	107	Pelindung Hewan	761	2212
32	Cisaranten wetan	115	2721	108	Wates	3913	4561
33	Pakemitan	2164	2737	109	Batununggal	6200	706
34	Sukamulya	690	3821	110	Mengger	1652	4434
35	Cipadung Kidul	1521	2764	111	Kujangsari	6469	6817
36	Cipadung Kulon	1896	613	112	Cimincrang	3589	3127
37	Cipadung wetan	2671	2676	113	Cisaranten Kidul	3025	1577
38	Mekar Mulya	1559	2547	114	Rancabolang	34587	41803
39	Cisaranten Kulon	2233	3355	115	Rancanumpang	2957	6793
40	Cisaranten Endah	4947	9054	116	Jatisari	19938	12054
41	Sukamiskin	3112	4318	117	Margasari	297	1820
42	Cisaranten Binaharapan	877	2567	118	Sekejati	2116	5805
43	Antapani Wetan	2997	1799	119	Cijaura	9432	10479
44	Antapani Kulon	797	1405	120	Cipamokolan	2856	6697
45	Antapani Tengah	5613	2101	121	Derwati	3620	4912
46	Antapani Kidul	3882	2561	122	Mekarjaya	1335	4699
47	Jatihandap	1824	4265	123	Manjahlega	2301	7546
48	Karang Pamulang	4944	1603	124	Balonggede	200	1496
49	Pasir Impun	2715	2492	125	Ciateul	0	0
50	Sindang Jaya	2402	3692	126	Pungkur	824	1358
51	Hegarmanah	2227	2277	127	Cigereleng	298	648
52	Ciumbuleuit	7293	5010	128	Ancol	0	0
53	Ledeng	104	2164	129	Pasir Luyu	2088	2874
54	Cipaganti	201	2546	130	Ciseureuh	1087	1701
55	Dago	300	616	131	Cikawao	1097	1285
56	Lebak gede	376	608	132	Paledang	1568	596
57	Lebak Siliwangi	1317	2780	133	Burangrang	1072	1619

NO	KELURAHAN	RATA-RATA (kg/bln)		NO	KELURAHAN	RATA-RATA (kg/bln)	
		2024	2025			2024	2025
58	Sadang Serang	163995	3737	134	Malabar	121	704
59	Sekeloa	1626	1728	135	Lingkar Selatan	998	1535
60	Citarum	1238	427	136	Turangga	694	1031
61	Tamansari	2825	10909	137	Cijagra	2711	5261
62	Cihapit	1035	913	138	Babakan Sari	2244	4908
63	Braga	339	253	139	Babakan Surabaya	1238	2638
64	Kebon Pisang	3911	5458	140	Sukapura	1179	3083
65	Merdeka	6316	8254	141	Kebon Kangkung	1682	1172
66	Babakan Ciamis	989	2050	142	Kebon Jayanti	3092	2586
67	Cicadas	362	1657	143	Cicaheum	1148	1679
68	Sukamaju	2553	3228	144	Kacaping	4800	2848
69	Cikutra	2643	4927	145	Kebon waru	1192	1767
70	Padasuka	264	1188	146	Cibangkong	644	1246
71	Sukapada	304	1078	147	Samoja	1052	2306
72	Pasir Layung	2545	2900	148	Kebon Gedang	1784	1196
73	Cihaur Geulis	4746	5482	149	Maleer	4597	10072
74	Sukaluyu	4641	5514	150	Binong	3101	6641
75	Neglasari	7223	8838	151	Gumuruh	15731	6099
76	Cigadung	1132	4458				

Sumber : Dinas Lingkungan Kota Bandung, (Data diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, rata-rata jumlah sampah organik yang diolah melalui Program Rumah Maggot pada 151 kelurahan di Kota Bandung selama tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan capaian yang cukup signifikan. Meskipun seluruh kelurahan menjalankan program yang sama dengan kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, jumlah sampah organik yang berhasil diolah menunjukkan variasi antarkelurahan. Sebagian kelurahan mampu mencapai tingkat pengolahan yang tinggi, sementara sebagian besar lainnya masih berada pada tingkat pengolahan yang relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan dukungan program yang sama belum menghasilkan capaian implementasi yang seragam di setiap kelurahan.

Kesenjangan capaian tersebut terlihat paling menonjol pada Kelurahan Rancabolang yang mencatatkan jumlah pengolahan sampah organik tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya di Kota Bandung. Capaian tersebut menarik untuk dikaji karena selain mengikuti Program Rumah Maggot yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2024, Kelurahan Rancabolang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan sampah organik sejak sebelum program tersebut diterapkan secara luas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rancabolang dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Untuk melihat capaian tersebut secara lebih rinci, data monitoring dan evaluasi pengolahan sampah organik Rumah Maggot di Kelurahan Rancabolang tahun 2024–2025 disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Data Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Sampah Organik Rumah Maggot Kelurahan Rancabolang Tahun 2024–2025

TAHUN	Bulan	jumlah sampah organik masuk	sumber sampah	Jumlah Sampah Organik Yang	Hasil Pengolahan Magotisasi							Jumlah Hasil Pengolahan Magotisasi
					Maggot Kering (Dry)	Fresh Maggot (Kg/bln)	Kasgot (Kg/bln)	Telur Maggot (Kg/bln)	Baby Maggot (Kg/bln)	Pupa Maggot (Kg/bln)	Residu Kasgot	
2024	JANUARI	27.000	Rumah Tangga, Rumah Makan dan Warung sayur & buah	27.000	0	1500	900	2250	1000	7500	3750	13150
	FEBRUARI	27.000	Rumah Tangga, Rumah Makan, Warung Sayur dan Pasar Induk Gedebage	29.000	0	1740	812	2,6	1016	7650	3625	11220,6
	MARET	27.000,00	Rumah Tangga, Rumah Makan dan Warung sayur /buah & Pasar Induk Gedebage	29.000,00	0	1.860,00	868	2,7	1.016,00	40	310	3.786,70
	APRIL	TIDAK ADA DATA										
	MEI	27.000	Rumah Tangga dan Komersial	25.000	0	1250	700	1,125	856	7650	3125	10457,125
	JUNI	51.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	34.000,00	0	1.400,00	784	1,11	1.070,00	7.650,00	3.125,00	10.905,11
	JULI	44.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	35.200,00	0	1.260,00	784	0,82	1.605,00	7.500,00	3.125,00	11.149,00
	AGUSTUS	50.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	40.000,00	0	1305	840	825	1605	975	1250	5550
	SEPTEMBER	56.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	47.040,00	0	1595	840	0,825	1605	975	1400	5015,825
	OKTOBER	56.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	49.600,00	0	1705	930	0,82	1605	975	1550	5215,82
	NOVEMBER	63.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	49.600,00	0	2.400,00	900	0,82	1.605,00	975	1.550,00	5.880,82
	DESEMBER	63.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	49.600,00	0	2.400,00	900	0,83	1.605,00	975	1.550,00	6.705,00

TAHUN	Bulan	Jumlah sampah organik masuk (Kg/Bulan)	sumber sampah	Jumlah Sampah Organik Yang terolah di	Hasil Pengolahan Magotisasi							Jumlah Hasil Pengolahan Magotisasi
					Maggot Kering (Dry Maggot)	Fresh Maggot (Kg/bln)	Kasgoot (Kg/Bln)	Telur Maggot (Kg/Bln)	Baby Maggot (Kg/Bln)	Pupa Maggot (Kg/Bln)	Residu Kasgot	
2025	JANUARI	63.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	49.600,00	0	2400	900	0,825	1605	975	1550	6.705,00
	FEBRUARI	63.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	44.600,00	0	2100	840	0,77	1470	840	1260	6020
	MARET	51.150,00	Rumah Tangga dan Komersial	49.445,00	0	2015	930	1,12	1575	900	1395	6545
	APRIL	51.150,00	Rumah Tangga dan Komersial	49.445,00	0	2170	1240	1,2	1650	900	1488	5961,2
	MEI	51.460,00	Rumah Tangga dan Komersial	50.065,00	0	3007	1550	1,38	1875	975	1674	7408,38
	JUNI	51.770,00	Rumah Tangga dan Komersial	50.375,00	0	3162	1860	1500	2025	1125	1860	9.672,00
	JULI	51.770,00	Rumah Tangga dan Komersial	50.375,00	0	3720	1860	1500	2025	1125	1860	10230
	AGUSTUS	63.000,00	Rumah Tangga dan Komersial	49.445,00	0	2400	900	1125	1920	1050	1240	7395
	SEPTEMBER	60.900,00	Rumah Tangga dan Komersial	46.225,00	0	2480	930	1,2	1950	1125	1200	7685
	OKTOBER	60.610,00	Rumah Tangga dan Komersial	54.230	0	2635	930	1200	1950	1170	1200	7885
	NOVEMBER	60.320,00	Rumah Tangga dan Komersial	54.056,00	0	2728	806	1170	1905	1125	1200	7734
	DESEMBER	60.320,00	Rumah Tangga dan Komersial	54.056,01	0	2790	868	1200	1950	1200	1320	8008

Sumber : Dinas Lingkungan Kota Bandung, (Data diolah Peneliti, 2025)

Data pada Tabel 1.2 memperkuat capaian Kelurahan Rancabolang yang telah ditunjukkan pada Tabel 1.1. Selama Januari 2024 hingga Desember 2025, jumlah sampah organik yang diolah melalui Rumah Maggot Rancabolang menunjukkan peningkatan, dari 27.000 kg per bulan pada awal 2024 menjadi 63.000 kg per bulan pada akhir 2024, dan berada pada kisaran 51.000–63.000 kg per bulan sepanjang tahun 2025. Peningkatan capaian tersebut juga didukung oleh semakin luasnya sumber sampah yang dikelola, yang semula berasal dari rumah tangga dan warung sayur/buah, kemudian berkembang dengan mencakup Pasar Induk Gedebage serta sektor komersial lainnya sejak pertengahan 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pengelolaan sampah organik di tingkat kelurahan serta kemampuan Rancabolang dalam memperluas sumber sampah yang dikelola.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program kemungkinan dipengaruhi tidak hanya oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana aparatur pelaksana mengelola pengalaman, kewenangan, dan interaksinya dengan masyarakat dalam menjalankan program di tingkat kelurahan. *Perspektif Street level bureaucracy* memandang bahwa birokrat garis depan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik karena berada pada posisi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat serta menghadapi berbagai

dinamika lapangan dalam implementasi kebijakan. Menurut Maynard-Moody & Portillo (2011), birokrat garis depan tidak hanya menjalankan aturan administratif, tetapi juga memiliki ruang diskresi dan otonomi dalam menghadapi kondisi lapangan yang kompleks. Dengan demikian, implementasi pengelolaan sampah berbasis Rumah Maggot di tingkat kelurahan menjadi menarik untuk dikaji melalui perspektif birokrasi garis depan atau *Street level bureaucracy*.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memandang penting untuk mengkaji bagaimana perspektif Birokrasi garis depan (*Street level bureaucracy*) dalam pengelolaan sampah berbasis Rumah Maggot di Kelurahan Rancabolang, Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran birokrat garis depan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal, dengan judul **"Perspektif Birokrasi Garis Depan (*Street Level Bureaucracy*) dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Rumah Maggot di Kelurahan Rancabolang, Kota Bandung"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, Maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketimpangan capaian pengelolaan sampah organik berbasis Rumah Maggot antar kelurahan di Kota Bandung, yang menunjukkan adanya perbedaan kemampuan aparatur kelurahan sebagai pelaksana garis depan (*frontline*) dalam menjalankan program pengelolaan sampah di tingkat lokal.
2. Interaksi aparatur kelurahan dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program Rumah Maggot masih berbeda-beda di setiap wilayah.
3. Pelaksanaan program Rumah Maggot di tingkat kelurahan menghadapi berbagai kendala operasional seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan lahan, terputusnya siklus budidaya maggot, serta faktor cuaca

dan hama, yang mendorong aparaturnya melakukan penyesuaian dan kebijaksanaan (*discretion*) dalam pelaksanaan program.

4. Belum diketahui bagaimana bentuk otonomi birokrat kelurahan dalam menjalankan Program Rumah Maggot
5. Belum diketahui bagaimana pengalaman dan praktik implementasi yang dilakukan birokrasi garis depan di Kelurahan Rancabolang berkontribusi sebagai masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis Rumah Maggot di Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, Maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status garis depan (*frontline*) birokrat kelurahan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung
2. Bagaimana interaksi antara birokrat kelurahan dengan warga dalam pengelolaan sampah berbasis Rumah Maggot di Kelurahan Rancabolang?
3. Bagaimana kebijaksanaan (*discretion*) yang diterapkan oleh birokrat kelurahan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung
4. Bagaimana otonomi yang dimiliki oleh birokrat kelurahan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung
5. Bagaimana keterlibatan birokrat kelurahan dalam pembuatan kebijakan akhir pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan status garis depan (*frontline*) birokrat kelurahan sebagai *street level bureaucrats* dalam pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan interaksi antara birokrat kelurahan dengan warga dalam pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung
3. Mengetahui dan mendeskripsikan kebijaksanaan (*discretion*) birokrat kelurahan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung.
4. Mengetahui dan mendeskripsikan otonomi birokrat kelurahan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung.
5. Mengetahui dan mendeskripsikan keterlibatan birokrat kelurahan dalam pembuatan kebijakan akhir sebagai birokrasi garis depan (*street level bureaucrats*) dalam pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di Kelurahan Rancabolang Kota Bandung.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoretis

Peneliti berharap penulisan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian administrasi publik, khususnya dalam memahami peran birokrasi garis depan (*street level bureaucracy*) dalam kebijakan lingkungan. Penelitian ini memperkaya literatur tentang dinamika birokrasi garis depan dalam konteks

kebijakan pengelolaan sampah berbasis lokal. Sekaligus sebagai syarat dalam kelulusan akademik selama masa perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Manfaat Praktis

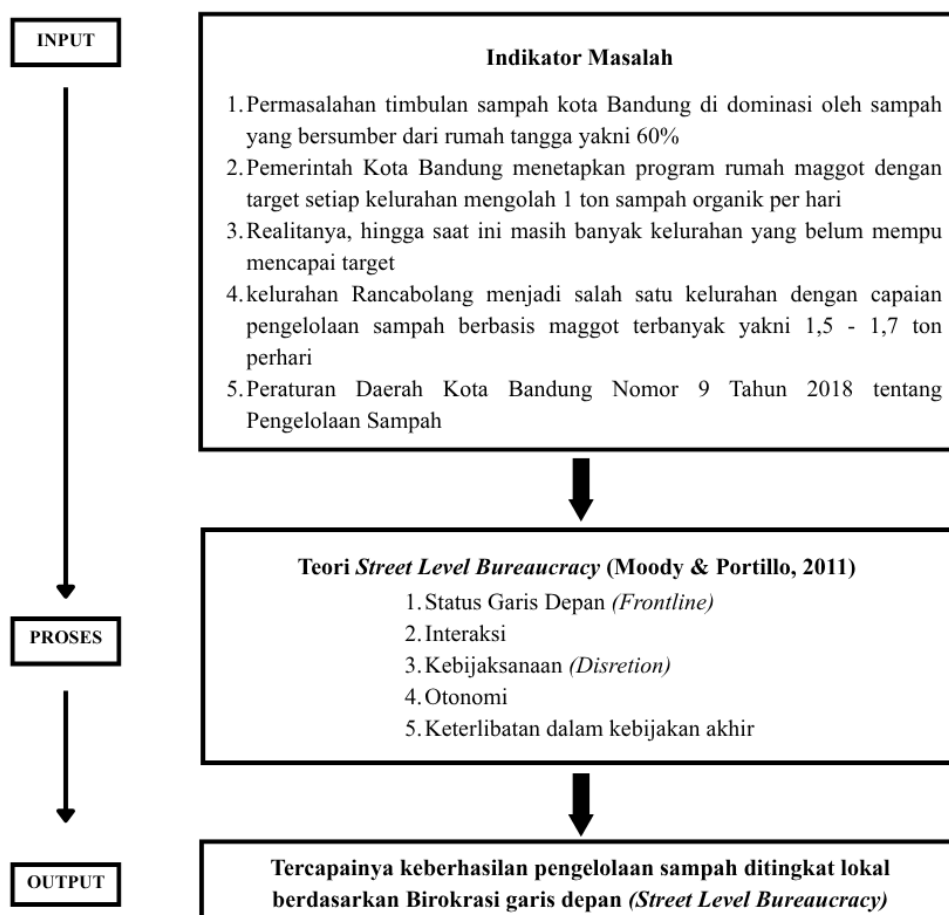
- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat membantu peneliti menerapkan pemahamannya tentang bagaimana peran birokrasi garis depan (*street level bureaucracy*) mempengaruhi keberhasilan implementasi di tingkat lokal terkhusus di dalam pengelolaan sampah berbasis *biokonversi* / rumah maggot.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya, Peneliti berharap dapat dimanfaatkan sebagai acuan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti pada bidang yang sama.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur pemikiran dari perumusan masalah hingga hasil yang diharapkan. Permasalahan utama berangkat dari kondisi Kota Bandung yang masih menghadapi timbunan sampah rumah tangga mencapai 60%. Sebagai respon, Pemerintah Kota Bandung menginisiasi program pengelolaan sampah organik berbasis rumah maggot dengan target setiap kelurahan mampu mengolah 1 ton sampah per hari. Dari target tersebut, Kelurahan Rancabolang menjadi lokus penelitian karena telah berhasil mengimplementasikan program rumah maggot hingga mencapai kapasitas 1 ton per hari.

Keberhasilan tersebut dianalisis menggunakan teori *Street level bureaucracy* menurut Maynard-Moody & Portillo (2011), yang menawarkan lima karakteristik struktural untuk memahami peran birokrat garis depan sebagai aktor penting dalam menjembatani kebijakan formal dengan realitas sosial masyarakat. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui lima karakteristik struktural yang dikemukakan Moody & Portillo, yaitu: status garis depan (*frontline*), interaksi dengan klien/warga, kebijaksanaan (*discretion*), otonomi, dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan akhir.

Proses analisis melalui karakteristik tersebut bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana birokrat kelurahan sebagai *street level bureaucrats* mampu menjembatani kebijakan dengan realitas masyarakat, sekaligus menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan program. Dengan demikian, output yang diharapkan dari kerangka berpikir ini adalah pemahaman komprehensif tentang keberhasilan pengelolaan sampah berbasis rumah maggot di tingkat lokal berdasarkan perspektif birokrasi garis depan *Street-level bureaucracy*.



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, 2025